

# **DIFERENSIASI PERSPEKTIF ANTARA DESA DINAS DAN DESA PAKRAMAN TERHADAP PENDUDUK PENDATANG (STUDI KASUS DI DESA PAKRAMAN TALEPUD, KECAMATAN TEGALLALANG, KABUPATEN GIANYAR)**

Ni Wayan Ayu Suparmi, Ida Bagus Made Astawa, Sutarjo

Jurusan Pendidikan Geografi  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: [ayusuparmibabol@yahoo.com](mailto:ayusuparmibabol@yahoo.com), [idabagusmadeastawa@yahoo.com](mailto:idabagusmadeastawa@yahoo.com),  
[sutarjo@undiksha.ac.id](mailto:sutarjo@undiksha.ac.id)

## **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan di Desa Pakraman Talepud dengan tujuan (1) mendeskripsikan karakteristik penduduk pendatang yang tinggal di wilayah Desa Pakraman Talepud, dan (2) mendeskripsikan perbedaan perspektif Desa Dinas Sebatu dan Desa Pakraman Talepud terhadap penduduk pendatang. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif, dengan studi populasi yang berjumlah 71 orang terdiri dari aparatur desa dinas, prajuru desa pakraman dan penduduk pendatang. Data dikumpulkan melalui metode wawancara dan pencatatan dokumen yang hasilnya dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui pendekatan keruangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik penduduk pendatang di Desa Pakraman Talepud berasal dari 3 kabupaten di Bali, berusia produktif, lebih dominan laki-laki, sebagian besar berpendidikan dasar, dan secara ekonomi memiliki variasi. Diferensiasi perspektif antara desa dinas dan desa pakraman terhadap penduduk pendatang menunjukkan adanya variasi dalam satu wilayah yang dipengaruhi oleh cara pandang system pemerintahan yang berlaku di masyarakat di Desa Pakraman Talepud. Perspektif desa dinas yaitu menerima pendatang dengan kelengkapan identitas diri dan biaya administrasi serta memperoleh hak dan kewajiban yang sama dengan penduduk asli. Sedangkan, perspektif desa pakraman yaitu menerima pendatang dengan kelengkapan identitas diri, biaya/iuran, dan adanya warga setempat yang menjamin keberadaannya, dengan keterbatasan hak dan kewajiban.

**Kata kunci:** penduduk pendatang; desa dinas; desa pakraman

## **Abstract**

The research was conducted in Pakraman Talepud with purpose (1) describe the characteristics of the migrant living in the area Pakraman Talepud, and (2) describe the differences perspectives the Village Department Sebatu and Pakraman Talepud about migrants. This research designed as research descriptive, with the study population which totaled 71 people consisting of apparatus village departments, prajuru pakraman and migrants. Data were collected through interviews and documents registration the results were analyzed using descriptive qualitative thought spatial approach. The results showed that the characteristics of migrants in Pakraman Talepud from 3 districts in Bali, aged productive, more dominant males, the majority of primary education, and the economy has variations. Differentiation perspective between the village of departments and pakraman against the migrants show the variations in an areawich is effected by means of view government system prevailing in society in the Village Pakraman Talepud. Perspective of the village office to receive the migrants with a complete identity and administrative costs as well as

acquire the same rights and obligations with the natives. Meanwhile, Pakraman perspective that receive the migrants with complete identity, pay dues, and the local residents to ensure its existence, with the limitations of rights and obligations.

**Keywords** : migrant, village departments, pakraman

## PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979, Bali dikenal adanya dua pengertian desa. Pertama, desa dalam pengertian hukum nasional. Dalam hal ini desa melaksanakan berbagai kegiatan administrasi pemerintahan atau kedinasan sehingga dikenal dengan istilah desa dinas atau desa administratif. Desa dalam pengertian yang kedua, yaitu desa adat atau desa pakraman, mengacu kepada kelompok tradisional dengan dasar ikatan adat istiadat dan terikat oleh adanya tiga pura utama (Kahyangan Tiga). Dasar pembentukan desa adat dan desa dinas memiliki persyaratan yang berbeda, sehingga wilayah dan jumlah penduduk pendukung sebuah desa dinas tidak selalu kongruen dengan desa adat.

Desa dinas adalah desa dengan sistem pemerintahan dinas yang merupakan perpanjangan dari pemerintah pusat. Desa dinas adalah suatu kesatuan wilayah di bawah kecamatan dan merupakan bagian dari struktur vertikal pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Desa sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan pada masyarakat terbawah, desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Para penduduk desa dinas terikat oleh suatu kesatuan fungsi yang dijalankan oleh desa sebagai kesatuan kedinasan (Geriya, dkk, 1986:30).

Desa pakraman merupakan suatu komunitas tradisional dengan fokus fungsi dalam bidang adat dan agama Hindu, merupakan kesatuan wilayah dimana para anggotanya secara bersama-sama melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan yang ditata oleh suatu sistem budaya (Pitana, 1994: 139). Desa pakraman dilandasi oleh konsep *Tri Hita Karana* yang terdiri dari *Parhyangan* yang terwujud dengan adanya pura-pura (*Pura Kayangan Tiga*), *Palemahan* menyangkut

wilayah desa *pakraman* tersebut, dan *Pawongan* yaitu terdiri dari warga (*krama*) desa.

Aspek yang sangat dinamis dalam suatu wilayah desa adalah aspek penduduk. Dinamika penduduk merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel-variabel pokok demografi (kelahiran, kematian, dan migrasi) yang berdampak pada jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Meskipun kelahiran dan kematian menentukan perubahan penduduk secara alami, tapi saat ini perpindahan penduduk memberi dampak yang signifikan. Tingkat perpindahan penduduk dapat naik atau turun dengan pesat dari tahun ke tahun, sehingga dalam waktu yang relatif singkat perpindahan penduduk kadang-kadang menyebabkan suatu perubahan besar terhadap jumlah penduduk. Salah satu penyebab perpindahan penduduk ke wilayah pedesaan adalah adanya potensi pariwisata. Potensi pariwisata yang ada pada suatu desa memiliki peluang ekonomi yang menjanjikan mengingat sektor pariwisata tersebut masih eksis di Bali.

Salah satu tempat yang menjadi tujuan para pendatang adalah di wilayah Desa Pakraman Talepud. Wilayah Desa Pakraman Talepud merupakan jalur wisata dan terdapat banyak toko yang menjual souvenir. Perkembangan industri pariwisata di daerah ini menyebabkan bertambahnya jumlah toko souvenir. Hal inilah yang memacu kedatangan para migran yang ingin mencari pekerjaan di bidang industri pariwisata, baik membangun toko souvenir, pedagang, maupun sebagai tenaga kerja. Besarnya persentase jumlah penduduk pendatang dengan penduduk asli yaitu 10 %. Persaingan di bidang ekonomi yang terjadi seperti dalam kesempatan usaha maupun kesempatan kerja. Alih fungsi lahan produktif dekat dengan jalan raya sebagian besar digunakan sebagai tempat

bermukim atau membangun toko souvenir maupun warung yang dihuni oleh para migran.

Adanya dualisme antara kewenangan desa administrasi yang mengizinkan kedatangan para migran dan kewenangan desa pakraman dalam menjalankan fungsi adatnya. Desa Pakraman Talepud merupakan desa adat yang ada di wilayah administratif Desa Dinas Sebatu. Kedatangan para migran ke wilayah administrasi desa merupakan hal yang biasa dan pemerintah mengijinkannya, tetapi dalam wilayah desa pakraman penerimaan para migran memerlukan persyaratan yang ketat. Hal ini karena Desa Pakraman Talepud sebagai institusi sosial-kultural berlandaskan agama Hindu dan ideologi Tri Hita Karana memiliki kewajiban mengharmoniskan kehidupan warga masyarakatnya secara *sekala* dan *niskala*. Dalam penerimaan penduduk pendatang yang dilakukan oleh desa dinas yaitu dengan mencatat dan melayani kelengkapan administrasi penduduk pendatang. Hak dan kewajiban yang diperoleh penduduk pendatang sama dengan yang didapatkan oleh penduduk asli. Sedangkan penerimaan penduduk pendatang oleh desa pakraman yaitu hanya mencatat kedatangannya, tetapi untuk hak dan kewajiban yang diperoleh oleh pendatang berbeda dengan penduduk asli. Perbedaan perspektif antara desa dinas dengan desa pakraman mengenai penduduk pendatang dapat memunculkan ketimpangan dalam bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya penduduk pendatang yang tinggal di desa pakraman dan sebagian besar memegang sektor ekonomi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik penduduk pendatang yang tinggal di wilayah Desa Pakraman Talepud, dan bagaimana diferensiasi perspektif antara Desa Dinas Sebatu dan Desa Pakraman Talepud terhadap penduduk pendatang.

Untuk mengkaji permasalahan tersebut maka digunakan teori sebagai berikut: (1) Definisi migran menurut

Perserikatan Bangsa-Bangsa “ *A migrant is a person who change his place of residence from one political or administrative area to another*”. Pengertian migran ini dikaitkan dengan pindah tempat tinggal secara permanen sebab selain itu di kenal pula *mover* yaitu orang yang pindah dari satu alamat ke alamat yang lain, dari rumah satu ke rumah yang lain dalam batas daerah kesatuan politik atau administratif, misalnya pindah dalam satu provinsi. (Rozy Munir, dalam Wirosuhardjo, 2004:116-117). Selanjutnya karakteristik migran, Todaro (1992:47) menyatakan bahwa karakteristik migran dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu karakteristik demografi, pendidikan dan ekonomi. (2) Kajian tentang desa dinas, desa dinas adalah desa dengan sistem pemerintahan dinas yang merupakan perpanjangan dari pemerintah pusat (Geriya, dkk, 1986:30). Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Pasal 7 tentang Desa, yakni mengurus urusan administrasi pemerintahan atau urusan kedinasan. (3) Kajian tentang desa pakraman, desa pakraman merupakan suatu komunitas tradisional dengan fokus fungsi dalam bidang adat dan agama Hindu, merupakan kesatuan wilayah dan ditata oleh suatu sistem budaya (Pitana, 1994: 139). Wewenang desa pakraman tersirat dalam Pasal 6, bagian (b) Perda No. 3 Tahun 2001 yaitu turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya terutama yang berkaitan dengan *Tri Hita Karana*.

Dualisme antara desa dinas dan desa pakraman terhadap penduduk pendatang, dalam perspektif desa dinas peraturan desa dinas mengenai penduduk pendatang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pasal 21 dan 22. Sesuai dengan hak asasinya setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia. Dalam perspektif desa

pakraman penanganan penduduk pendatang mulai dari proses pendaftaran (*pasadok*), pengawasan dan tindakan yang berkaitan dengan penduduk pendatang ditangani oleh *prajuru* desa pakraman. Pada *awig-awig* juga mengatur tentang hak dan kewajiban dari para *tamiu* yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban yang diperoleh penduduk pendatang berbeda dengan *krama desa*.

## METODE

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif dengan studi populasi pada 71 orang terdiri dari aparatur desa dinas, *prajuru* desa pakraman dan penduduk pendatang. Data dikumpulkan melalui metode wawancara. Hasil penelitian dianalisis menggunakan pendekatan keruangan secara deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Karakteristik Penduduk Pendatang di Desa Pakraman Talepud

Karakteristik migran pada umumnya dapat dilihat dari tiga hal, yaitu karakteristik demografi, karakteristik sosial, dan karakteristik ekonomi. Karakteristik demografi penduduk pendatang menurut daerah asalnya hanya berasal dari Provinsi Bali. Perpindahan yang dilakukan oleh penduduk pendatang ini hanya melintasi batas administrasi desa, kecamatan, atau kabupaten dalam satu provinsi. Daerah asal penduduk pendatang dominan berasal dari Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan indikator umur, Umur penduduk pendatang yang tinggal di Desa Pakraman Talepud termuda 21 tahun dan tertua 45 tahun. Penduduk pendatang di Desa Pakraman Talepud termasuk penduduk dalam usia produktif. Penduduk dalam usia produktif ini adalah penduduk yang aktif mencari pekerjaan, sehingga memungkinkan untuk melakukan perpindahan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Umur 27-30 tahun adalah usia penduduk pendatang yang dominan di Desa Pakraman Talepud.

Perbandingan jenis kelamin penduduk pendatang di Desa Pakraman Talepud, pendatang berjenis kelamin laki-

laki lebih dominan daripada jumlah jenis kelamin perempuan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh John Here (dalam Rusli, 1982 :12), bahwa kebanyakan individu yang bermigrasi adalah laki-laki dewasa yang memiliki tanah sempit dan tidak memiliki kedudukan kepemimpinan di desanya. Sedangkan kaum wanita lebih cenderung mengurus rumah tangganya. Tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga mengharuskan untuk terjun sebagai pekerja, guna mencukupi kebutuhan keluarganya. Selain itu, laki-laki lebih memiliki kecenderungan untuk melakukan perpindahan.

Status kawin penduduk pendatang di Desa Pakraman Talepud lebih banyak atau didominasi oleh penduduk pendatang yang sudah kawin dari pada yang belum kawin. Berdasarkan data primer yang diperoleh, sebagian besar penduduk pendatang telah tinggal di Desa Pakraman Talepud lebih dari 5 tahun. Lama maksimum pendatang yang tinggal di Desa Pakraman Talepud adalah 15-17 tahun. Lama tinggal penduduk pendatang di Desa Pakraman Talepud yang dominan adalah selama 9-11 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi dari penduduk pendatang dengan lingkungan sekitar cukup bagus, baik dengan lingkungan alam maupun lingkungan sosial masyarakatnya.

Karakteristik penduduk pendatang berdasarkan pendidikan yang tinggal di Desa Pakraman Talepud diperoleh keseluruhan penduduk pendatang di Desa Pakraman Talepud mendapatkan pendidikan melalui pendidikan formal. Penduduk pendatang juga dapat ditinjau dari tingkat pendidikan. Sebagian besar penduduk pendatang menamatkan pendidikan hanya sampai di tingkat sekolah dasar (SD) dibandingkan dengan pendatang yang menamatkan SMP dan SMA. Hal ini disebabkan karena keterbatasan biaya untuk melanjutkan pendidikan serta besarnya kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi.

Tingkat pendidikan sangat menentukan calon tenaga kerja saat akan memasuki sektor formal. Hal ini membuat penduduk beralih ke sektor nonformal

yang tidak menuntut syarat pendidikan tinggi. Adanya korelasi yang nyata antara taraf pendidikan yang diselesaikan dengan kemungkinan atau dorongan personal untuk melakukan migrasi. Mereka yang bersekolah lebih tinggi, kemungkinan untuk bermigrasi lebih besar. Kondisi ini disebabkan oleh perolehan kesempatan kerja sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan dan semakin kuat keinginan untuk melakukan migrasi.

Meskipun tidak memiliki pendidikan yang tinggi, mereka tetap antusias melakukan migrasi. Variasi pekerjaan penduduk pendatang mulai dari buruh, pedagang, tukang bangunan, pemahat, penjahit, montir, dan wiraswasta. Jenis pekerjaan yang paling dominan digeluti oleh penduduk pendatang di Desa Pakraman Talepud adalah sebagai buruh. Sebagian besar pendatang yang bekerja sebagai buruh merupakan buruh pada industri kerajinan tangan. Kepemilikan tempat tinggal mereka merupakan kontrakan/kos.

Variasi pendapatan yang diperoleh penduduk pendatang berbanding lurus dengan jenis pekerjaan serta banyaknya curahan jam kerjanya. Rata-rata pendapatan penduduk pendatang di Desa Pakraman Talepud yaitu Rp. 1.148.438 per bulan. Besaran pendapatan penduduk pendatang yang paling dominan terdapat pada nominal Rp.510.000 – Rp 1.010.000. Pendapatan per bulan dari masing-masing penduduk pendatang terkadang tidak menentu. Secara umum pendapatan penduduk pendatang masih rendah, mengingat lebih dari 50% pendapatan penduduk pendatang di bawah upah minimum provinsi (UMP) 2013 yaitu Rp 1.180.000 per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk pendatang di Desa Pakraman Talepud belum sejahtera, serta belum memenuhi salah satu motif mereka melakukan perpindahan yaitu mencari penghidupan yang lebih baik daripada di daerah asalnya.

Jumlah pengeluaran penduduk pendatang bervariasi, sebagian besar berbanding lurus dengan pendapatan dan pekerjaannya. Rata-rata pengeluaran per

bulannya adalah Rp 854.766. Pengeluaran masing-masing penduduk berbeda, pengeluaran yang paling banyak yaitu pendatang yang bekerja sebagai pedagang dan wiraswasta.

Perpindahan penduduk membawa dampak terhadap struktur demografis dan ekonomi suatu wilayah. Para penduduk pendatang berasal dari berbagai daerah yang memiliki tujuan tertentu. Para penduduk pendatang memiliki karakteristik tertentu seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, dan ekonomi. Dari pembahasan di atas karakteristik penduduk pendatang sangat bervariasi, baik dari indikator demografi, pendidikan, dan ekonominya.

## **2. Diferensiasi Perspektif Desa Dinas dengan Desa Pakraman terhadap Penduduk Pendatang di Desa Pakraman Talepud**

Dalam hal ini diferensiasi perspektif yaitu perbedaan pandangan atau sekumpulan asumsi tentang suatu objek kajian antara 2 subjek atau lebih. Perbedaan pandangan dari masing-masing objek ini dapat menjadi ciri-ciri dari subjek tersebut. Perbedaan perspektif antara desa dinas dan desa pakraman ini dilihat dari peraturan tentang pendatang yaitu tata cara pendaftaran, hak dan kewajibannya. Peraturan desa dinas mengenai penduduk pendatang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pasal 21 dan 22. Dalam peraturan ini dijelaskan tentang klasifikasi perpindahan dan tatacara pendaftaran perpindahan penduduk di seluruh wilayah NKRI. Sedangkan pada desa pakraman peraturan penduduk pendatang mengacu pada *awig-awig* desa. Pelaporan perpindahan yang dilakukan disertai dengan kelengkapan dokumennya merupakan langkah tertib administrasi.

Pencatatan pindah datang penduduk biasanya dilaksanakan pada tingkat pemerintahan terkecil yaitu desa. Dalam legalisasi penduduk pendatang yang dilakukan oleh desa dinas dengan desa pakraman ternyata terdapat beberapa

perbedaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dinas dan pimpinan desa pakraman, legalisasi penduduk

pendatang yang berlaku di wilayah Desa Pakraman Talepud antara desa dinas dan desa pakramannya terdapat perbedaan.

**Tabel 1. Persyaratan Legalisasi Penduduk Pendatang antara Desa Dinas Sebatu dan Desa Pakraman di Desa Pakraman Talepud**

No.	Jenis Desa	Persyaratan Legalisasi	
		Administrasi	Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Desa Dinas	Identitas diri (KTP / Surat Pindah Datang / Surat Jalan, dll).	Antar Desa Rp.15.000 Antar Kecamatan Rp.25.000 Antar Kabupaten Rp.50.000 Antar Provinsi Rp.100.000
2	Desa Pakraman	Identitas diri (KTP / Surat Pindah Datang / Surat Jalan, dll). Adanya warga desa pakraman yang menjamin/bertanggungjawab.	Beragama Hindu Rp.20.000 per bulan Non Hindu Rp.100.000 per bulan

Sumber: data primer 2013

Berdasarkan Tabel 4.19 menunjukkan bahwa terdapat diferensiasi perspektif antara desa dinas dan desa pakraman terhadap penduduk pendatang dilihat dari segi persyaratan legalisasi administrasi. Diferensiasi persyaratan legalisasi administrasi, yaitu pada perspektif desa pakraman penduduk pendatang yang ingin tinggal di wilayah Desa Pakraman Talepud harus memiliki kenalan baik teman maupun saudara dari warga/*krama* yang bersedia menjamin atau bertanggungjawab terhadap keberadaannya.

Pada biaya juga terdapat perbedaan, biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh penduduk pendatang ke desa dinas berdasarkan tingkatan batas wilayah administrasi seperti desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Pembayaran biaya administrasi di desa dinas berlangsung pada saat legalisasi penduduk pendatang.

Sedangkan pada desa pakraman besaran biaya yang dikenakan berdasarkan agama yang dianut

penduduk pendatang dibagi menjadi 2, yaitu agama Hindu dan Non Hindu. Perbedaan besaran biaya yang dikenakan dilatarbelakangi karena penduduk pendatang yang beragamaan Hindu ikut terlibat dalam aktivitas keagamaan yang ada di Desa Pakraman Talepud, sedangkan pendatang yang non Hindu tidak. Pembayaran biaya administrasi tersebut berlangsung tiap bulan selama pendatang itu tinggal di wilayah Desa Pakraman Talepud.

Perbedaan perspektif antara desa dinas dan desa pakraman juga dilihat dari hak dan kewajiban. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dinas dan pimpinan desa pakraman, hak penduduk pendatang yang berlaku di wilayah Desa Pakraman Talepud antara desa dinas dan desa pakramannya terdapat beberapa diferensiasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Hak Penduduk Pendatang Berdasarkan Perspektif Desa Dinas Sebatu dan Desa Pakraman di Desa Pakraman Talepud**

No.	Kriteria	Jenis Desa	
		Desa Dinas	Desa Pakraman
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sosial	Jaminan sosial, kesehatan, lingkungan hidup yang baik, bergaul, bertempat tinggal, pemanfaatan sumber daya	Jaminan sosial, kesehatan, lingkungan hidup yang baik, bergaul, bertempat tinggal sementara
2.	Ekonomi	Bekerja, melakukan berbagai aktivitas perekonomian, mendapatkan upah/imbalan	Bekerja, melakukan berbagai aktivitas perekonomian, mendapatkan upah/imbalan
3.	Pendidikan	Memperoleh pendidikan, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi	Memperoleh pendidikan, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
4.	Budaya	Kebebasan melestarikan budayanya	Kebebasan melestarikan budayanya yang tidak berlawanan dengan kebudayaan setempat
5.	Keamanan	Perlindungan hukum dan pengayoman	Mendapat perlindungan dan pengayoman

Sumber: data primer 2013

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa hak bagi penduduk pendatang yang datang ke desa pakraman talepud hampir sama baik dari perspektif desa dinas maupun desa pakraman. Hak bagi penduduk pendatang pada dasarnya merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap penduduk di Indonesia. Hak yang sama diperoleh oleh penduduk pendatang yaitu hak dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan keamanan. Serta terdapat diferensiasi hak pada perspektif desa dinas yaitu hak pemanfaatan sumber daya alam sekitar. Sedangkan hak bagi pendatang dalam perspektif desa pakraman yaitu hak untuk tinggal hanya diperbolehkan untuk sementara tidak

menetap, pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas, dan hak untuk mengembangkan kebudayaannya hanya yang bersifat positif bagi kebudayaan desa pakraman setempat. Sehingga dapat dilihat hak penduduk pendatang dalam perspektif desa pakraman bersifat lebih terbatas dibandingkan dengan perolehan hak dari perspektif desa dinas.

Dalam perolehan kewajiban penduduk pendatang di desa dinas dengan desa pakraman tergantung pada peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dinas dan pimpinan desa pakraman, kewajiban penduduk pendatang yang berlaku di wilayah Desa Pakraman Talepud antara

desa dinas dan desa pakramannya terdapat beberapa perbedaan. Untuk lebih

jelasan dapat dilihat pada Tabel 3, sebagai berikut.

**Tabel 3. Kewajiban Penduduk Pendetang Berdasarkan Perspektif Desa Dinas Sebatu dan Desa Pakraman di Desa Pakraman Talepud**

No.	Kriteria	Jenis Desa	
		Desa Dinas	Desa Pakraman
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sosial	Wajib memelihara ketentraman masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, wajib membantu pembangunan, membayar pajak, wajib ikut mencegah timbulnya konflik sosial	Wajib memelihara ketentraman masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, wajib membantu pembangunan, wajib ikut mencegah timbulnya konflik sosial
2.	Ekonomi	Wajib mengembangkan perekonomian berasaskan kekeluargaan dan tidak merugikan orang lain	Wajib mengembangkan perekonomian berasaskan kekeluargaan dan tidak merugikan orang lain, Wajib membayar iuran untuk usaha yang dikelola sebesar Rp. 30.000 per bulan
3.	Budaya	Wajib memelihara kebudayaan dan menghormati kebudayaan lainnya	Wajib memelihara kebudayaan dan menghormati kebudayaan lainnya
4.	Keamanan	Wajib menjunjung hukum yang berlaku, Wajib memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat	Wajib menjunjung hukum yang berlaku baik hukum negara maupun hukum adat, Wajib memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

Sumber: data primer 2013

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa kewajiban bagi penduduk pendatang yang datang ke Desa Pakraman Talepud terdapat perbedaan baik dari perspektif desa dinas maupun desa pakraman. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung

jawab. Dalam perolehan kewajiban penduduk pendatang di desa dinas dengan desa pakraman tergantung pada peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dinas dan pimpinan desa pakraman, kewajiban penduduk pendatang yang berlaku di

wilayah Desa Pakraman Talepud antara desa dinas dan desa pakramannya terdapat beberapa diferensiasi.

Kewajiban bagi pendatang dalam perspektif desa pakraman yaitu wajib untuk membayar iuran sebesar Rp. 30.000 per bulan untuk usaha yang dikelola oleh penduduk pendatang. Selain itu, penduduk pendatang harus menjunjung hukum adat yang berlaku. Sehingga dapat dilihat kewajiban penduduk pendatang dalam perspektif desa pakraman bersifat lebih banyak dibandingkan dengan kewajiban pendatang yang dibebankan dalam perspektif desa dinas.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut (1) Karakteristik para migran di Desa Pakraman Talepud adalah penduduk usia produktif yang didominasi oleh laki-laki dan berstatus kawin serta berpendidikan rendah. Rendahnya pendidikan menyebabkan pekerjaannya dominan sebagai buruh. Pendapatan bervariasi dengan rata-rata Rp 1.148.438. Dan rata-rata pengeluaran per bulannya adalah Rp 854.766. (2) Perbedaan perspektif antara desa dinas dan desa pakraman ini dilihat dari peraturan tentang pendatang yaitu tata cara pendaftaran, hak dan kewajibannya. Pada kriteria administrasi desa pakraman memiliki persyaratan yang lebih. Persyaratan tersebut yaitu penduduk pendatang yang ingin tinggal di wilayah Desa Pakraman Talepud harus ada warga/*krama* yang bersedia menjamin atau bertanggungjawab terhadap keberadaannya.

Biaya yang harus dibayarkan oleh penduduk pendatang ke desa dinas berdasarkan tingkatan batas wilayah administrasi, sedangkan pada desa pakraman besaran biaya yang dikenakan berdasarkan agama yang dianut penduduk pendatang dan pembayaran biaya administrasi tersebut berlangsung tiap bulan selama pendatang itu tinggal. Hak penduduk pendatang dalam perspektif desa pakraman bersifat lebih terbatas dibandingkan dengan perolehan hak dari perspektif desa dinas. Kewajiban

penduduk pendatang dalam perspektif desa pakraman bersifat lebih banyak dibandingkan dengan kewajiban pendatang yang dibebankan dalam perspektif desa dinas

Saran yang dapat peneliti berikan yaitu : (1) Dengan melihat karakteristik migran dari segi pendidikan, umumnya migran yang datang ke Desa Pakraman Talepud berpendidikan rendah, sehingga diharapkan adanya suatu program dari pemerintah dalam upaya pemberian pelatihan keterampilan kerja bagi penduduk pendatang. (2) Sebagian besar penduduk pendatang sudah tertib administrasi. Diharapkan agar pendataan penduduk pendatang terus dilakukan secara berkesinambungan, serta pengawasan terhadap hak dan kewajiban penduduk pendatang di Desa Pakraman Talepud.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Geriya, I Wayan, dkk.1986. *Sistem Gotong Royong dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Bali*. Denpasar: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Munir, Rozy. 2004. *Migrasi Dalam Dasar-dasar Demografi*. (editor Wirosuhardjo) Jakarta : Lembaga Penelitian FE UI.
- Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. (Lembar Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29) tersedia pada <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/PROV-BALI-3-2001.doc> diakses pada 13 Maret 2013.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158) tersedia pada <http://www.hukumonline.com/pusadata/detail/24508/node/26/pp-no->

- [72-tahun-2005-desa](#) diakses pada 10 Mei 2013.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. tersedia pada <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/5/83/1710.bpkp> diakses pada 30 Mei 2013.
- Pitana, I Gde. 1994. *Desa Adat dalam Arus Modernisasi*, dalam Pitana, I Gde (ed). 1994. *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar: BP.
- Rusli, Said. 1982. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Bogor: LP3ES.
- Todaro, M.P. 1992. *Kajian Ekonomi Migrasi Internal di Negara Berkembang* (terjemahan). Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tersedia pada <http://www.hukumonline.com/pustadata/download/lt4c331f0dcb6d2/parent/2488> diakses pada 16 Februari 2013